

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH, SH
Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS, S.S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung tempat bekerja sangatlah perlu dilakukan karena tempat yang tidak nyaman akan berpengaruh pada gairah kita dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin meliputi pembersihan rutin atap gedung dan penataan arsip serta perluasan ruang.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Ruang yg harus diperluas;
- Jenis yang perlu dipelihara/diperbaiki.

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Kenyamanan dan keindahan gedung kantor.

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perluasan ruang		X										
2	Pemeliharaan gedung kantor dan gedung aset	X		X		X		X		X		X	

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp.27.500.000,-

- Perluasan ruang ukuran 1,25 M x 3 M = Rp.10.000.000
- Pemeliharaan gedung kantor BPKAD dan gedung aset = Rp. 17.500.000

11. PENERIMA MANFAAT : Staf BPKAD

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. NAMA KPA/PPTK :
KPA : MURDJAYADI, SH
PPTK: : HARIYANTO, S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan 2016
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas.
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas sangatlah perlu dilakukan karena Kendaraan tersebut merupakan alat transportasi yang sewaktu-waktu terus digunakan, dan agar didalam melaksanakan tugas kelapangan tidak ada hambatan maka Kendaraan Dinas tersebut dipelihara secara berkala.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- jadwal pemeliharaan ;

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT
Terpeliharanya kendaraan Dinas.

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Belanja Jasa Service		X	X	X	X		X	X	X	X		X
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 110.000.000,-

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas = Rp. 48.000.000
- Belanja Jasa Service = Rp. 55.250.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas = Rp. 6.750.000

11. PENERIMA MANFAAT : Semua Karyawan/Karyawati BPKAD yang menggunakan Kendaraan dinas

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. NAMA KPA/PPTK :
KPA : MURDJAYADI, SH
PPTK: : HARIYANTO, S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan 2016
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sangatlah perlu dilakukan karena Perlengkapan Gedung Kantor tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Data jadwal pemeliharaan ;
- Peralataan yang lengkap dalam pemeliharaan.

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Terpeliharanyaperengkapan gedung kantor.

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			X			X			X			X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 10.000.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : Semua Karyawan/Karyawati BPKAD .

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M.IBNU SOEYOETI, SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2017

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. NAMA KPA/PPTK :
KPA : MURDJAYADI, SH
PPTK: : HARIYANTO, S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan 2016
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
 - b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor sangatlah perlu dilakukan karena Peralatan Gedung Kantor tersebut merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Sumber Pendanaan ;

- Data jadwal pemeliharaan ;
- Peralataan yang lengkap dalam pemeliharaan.

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Peralatan kerja dapat berfungsi normal..

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			X			X						X	

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp.5.000.000,-

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin = Rp. 5.000.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : Semua Karyawan/Karyawati BPKAD .

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M.IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan .
3. NAMA KPA/PPTK
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO, S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

a. Gambaran Umum.

Penyediaan Jasa administrasi keuangan merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan agar didalam melaksanakan pembayaran honorarium baik tenaga sukwan maupun honar-honor lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat berjalan lancar tidak terlambat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber pendanaan ;
- Sumber Daya Manusia handal ;
- Perangkat Teknologi yang memadai ;

6. KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT

Terbayarnya tenaga sukwan dan honorarium lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			X									
4	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	X		X	X		X			X		X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN Rp. 388.719.565,-

Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	= Rp. 364.920.000
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	= Rp. 15.600.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	= Rp. 7.500.000
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	= Rp. 699.565

11. Penerima manfaat Semua staf BPKKD .
12. Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, SSOS
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO, S.Sos
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Jasa Kebersihan Kantor merupakan kebutuhan setiap organisasi agar didalam melaksanakan suatu kegiatan tidak terganggu oleh adanya keadaan disekitarnya, karena kalau keadaan kantor maka dalam melaksanakan tugas akan terganggu juga. Oleh karena itu kebersihan adalah merupakan pendukung dari pelaksanaan tugas.

c. Data Dukung Pelaksanan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Sumber Daya Manusia ;
- Perangkat /alat kebersihan yang memadai .

6. KELUARAN KEGIATAN/ Output
Kantor yang bersih dan nyaman.

7. SETRATEGAI PENCAPAIAN KELUARAN

a. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- -

10. BIAYAYANG DIPERLUKAN : Rp.38.900.000 ,-

Honorarium Pegawai = Rp. 32.400.000
Honorer/Tidak Tetap

Belanja Peralatan Kebersihan = Rp. 6.500.000
Dan Bahan Pembersih

11. PENERIMA MANFAAT : Semua staf BPKKD .

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, SSOS
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M.IBNU SOEYOETI, SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

6. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik
8. NAMA KPA/PPTK
- Nama KPA : MURDJAYADI, SH
- Nama PPTK : HARIYANTO, S.Sos
9. RUJUKAN
- d. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
- e. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
- f. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

10. LATAR BELAKANG

d. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

e. Gambaran Umum.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan, sumber daya listrik ini merupakan sumber penerangan dan telepon berguna sebagai pendukung dari pelaksanaan tugas.

f. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Tagihan telepon
- Tagihan listrik
- Tagihan air

11. Keluaran Kegiatan/Output

Jumlah tagihan listrik telepon dan air yang terbayar

12. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode pelaksanaan.

- Praktek.

b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Telepon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Belanja Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Belanja Listrik			X			X			X			X

13. Waktu Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

14. Spesifikasi Teknis

15. Biaya yang diperlukan Rp.35.500.000,-

Belanja Telepon = Rp.10.800.000

Belanja Air = Rp. 3.400.000

Belanja Listrik = Rp. 21.300.000

16. Penerima Manfaat : semua pegawai BPKAD .

17. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO, S.SOS
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. LATAR BELAKANG
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dilaksanakan guna mensosialisasikan peraturan2 baru yang berkaitan dengan pengusulan, penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan pertanggungjawaban pemberian bantuan, hibah dan bansos kepada masyarakat secara langsung di wilayah kabupaten Bojonegoro dan pelaksanaan tersebut dilakukan di kecamatan-kecamatan, serta memenuhi undangan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan di Kecamatan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Sumber daya manusia;
- Undangan rapat;

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- a. Methode pelaksanaan.
 - Praktek.
- b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan
 - Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- o -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 219.757.752,-

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = 219.757.752,-

11. PENERIMA MANFAAT : Pegawai BPKAD yang ditunjuk untuk Hadir

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M.IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS
4. RUJUKAN
 - a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
 - b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
 - c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. LATAR BELAKANG
 - d. Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Bahan bacaan baik majalah, surat kabar terlebih buku-buku peraturan perundang-undangan tentang keuangan, aset yang terkait secara langsung dengan tupoksi BPKAD maupun buku pengetahuan umum sangat dibutuhkan oleh pimpinan dan seluruh staf BPKAD guna menambah wawasan dan pengetahuan keuangan, aset maupun pengetahuan umum lainnya

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Sumber daya manusia

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Terbayarnya tagihan langganan surat kabar

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- a. Metode pelaksanaan.
 - Praktek.
- b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan
 - Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- o -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 3.600.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah = Rp. 3.600.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : seluruh pegawai BPKAD

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M.IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan makanan dan minuman.
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS

4. RUJUKAN

- a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
- b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
- c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

5. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah banyak melakukan koordinasi, rekonsiliasi data dengan mengundang, TAPD, DPRD, SKPD, maupun masyarakat guna mendapatkan informasi maupun menyebarkan informasi tentang penyusunan APBD, Perubahan APBD, laporan keuangan dan aset serta sosialisasi hibah bansos.

Terkait hal tersebut maka diperlukan ketersediaan makanan dan minuman agar kegiatan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Daftar hadir
- Undangan kegiatan

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai serta makanan dan minuman rapat

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- Methodode pelaksanaan.
 - Praktek.
- Jadwal Tahapan Pelaksanaan
 - Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

8. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Januari sampai dengan bulan Desember

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- o -

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 322.170.000,-

- Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai = Rp. 8.000.000,-

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat = Rp. 314.170.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : Pegawai BPKAD serta undangan rapat yang hadir

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

5. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
6. PROGRAM/KEGIATAN : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
7. NAMA KPA/PPTK :
- Nama KPA : MURDJAYADI, SH
- Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS
8. RUJUKAN
- d. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
- e. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
- f. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
6. LATAR BELAKANG
- d. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

a. Gambaran Umum

Kendaraan dinas bagi mobilitas di BPKAD sangat diperlukan , kendaraan dimaksud dipergunakan untuk transportasi pegawai apabila mengikuti kegiatan diluar kantor BPKAD serta mengangkut arsip-arsip yang akan dipindahkan ke gedung arsip BPKAD, untuk menunjang hal tersebut selain kondisi kendaraan yang baik juga harus memenuhi ketentuan perizinan terkait pajak kendaraan maupun STNK

b. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Sumber daya manusia

13. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

Terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

14. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

c. Methode pelaksanaan.

- Praktek.

d. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

- Bulan Maret

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		X	X				X			X		
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		X	X				X			X		

15. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Pebruari 2017 sampai dengan oktober 2017

16. SPESIFIKASI TEKNIS

- o -

17. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 25.000.000,-

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor = Rp. 21.000.000,-
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan = Rp. 4.000.000,-

18. PENERIMA MANFAAT : Staf dan pimpinan BPKAD yang menggunakan kendaraan dinas/operasional

19. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Pebruari sampai dengan bulan oktober

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2017**

1. NAMA SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2. PROGRAM/KEGIATAN : Pengadaan mebeleur
3. NAMA KPA/PPTK :
Nama KPA : MURDJAYADI, SH
Nama PPTK : HARIYANTO,S.SOS

4. RUJUKAN

- a. Kerangka Acuan Kerja Perencanaan
- b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
- c. Renstra SKPD : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

5. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 ;

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD

b. Gambaran Umum

Arsip mempunyai peran penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggung jawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Untuk itu maka arsip harus disimpan dengan baik, berkaitan dengan hal dimaksud maka arsip di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset harus disimpan dengan baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuat lemari arsip sebanyak 4 buah.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Design lemari arsip
- Penyedia barang

6. KELUARAN KEGIATAN/ OUTPUT

4 buah lemari arsip

7. SETRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- a. Metode pelaksanaan.
 - Praktek.
- b. Jadwal Tahapan Pelaksanaan
 - Bulan Maret

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip			X									

8. WAKTU PELAKSANAAN

- o Bulan Maret

9. SPESIFIKASI TEKNIS

- o - Terbuat dari kayu

10. BIAYA YANG DIPERLUKAN : Rp. 27.000.000,-

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip = Rp. 27.000.000,-

11. PENERIMA MANFAAT : Staf BPKAD

12. MONITORING DAN EVALUASI :

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan bulan Maret

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MURDJAYADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19590820 198603 1 014

HARIYANTO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671208 199309 1 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003